

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI
DENGAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARTUR NEGARA, BKN, LAN, DAN ANRI
SENIN, 15 JANUARI 2007**

Tahun Sidang : 2006-2007
Masa Persidangan : III
Rapat Ke : --
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi II DPR RI
Dengan : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, BKN, LAN, dan ANRI
Hari/Tanggal : **Senin, 15 Januari 2007**
Pukul : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II (KK.III)
Ketua Rapat : E.E. Mangindaan, S.IP/Ketua Komisi II DPR RI.
Sekretaris Rapat : Suroso, SH/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara : 1. Perkembangan dan Perbaikan Mekanisme Proses Rekrutmen CPNS;
2. Manajemen Kepegawaian Termasuk Sistem Penggajian, Mutasi, Rotasi maupun Pensiunan PNS;
3. Masalah Aktual Lainnya.
Hadir : 39 Anggota dari 49 Anggota Komisi II DPR RI
Izin : 10 Anggota Komisi II DPR RI

HADIR :

♦ E.E. Mangindaan, S.IP, ♦ Drs. H. Priyo Budi Santoso, ♦ Ir. Sayuti Asyathri, ♦ Dra. Hj. Ida Fauziyah, ♦ Drs. H. Sulaiman Effendi, ♦ Ferry Mursyidan Baldan, ♦ H. Abdul Nurhaman, S.IP, S.Sos, M.Si, ♦ Drs. H.A. Mudjib Rochmat, ♦ Drs. Made Suwendha, ♦ Prof. Drs. H. Rustam E. Tamburaka, ♦ DR. H. Abdul Gafur, ♦ Suryana, ♦ Drs. Agus Condro Prayitno, ♦ Dra. Eddy Mihati, M.Si, ♦ Drs. Agustinus Clarus, ♦ Drs. Ben Vincent Djeharu, MM, ♦ Hj. Tumbu Saraswati, ♦ Alexander Litaay, ♦ Drs. Soewarno, ♦ H. Romzi Nihan, S.IP, ♦ Dra. Lena Maryana Mukti, ♦ TGK. H. Muhammad Yus, ♦ H. Suharso Monoarfa, ♦ Drs. H. Sofyan Ali, MM, ♦ H. Chufran Hamal, SH, MKn, ♦ Ignatius Mulyono, ♦ dr. Jumaini Andriana Sihombing, ♦ Hj. Nidalia Djohansyah Makki, ♦ Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc, ♦ H.M. Khaidir M. Wafa, MA, ♦ Tony Wardoyo, ♦ M. Nasir Jamil, S.Ag, ♦ H. Jazuli Juwaini. Lc. ♦ Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si, ♦ Agus Purnomo, S.IP, ♦ Anhar, SE, ♦ Jamaluddin Karim, SH, ♦ Pastor Saut M. Hasibuan.

IZIN :

♦ H. Fachruddin ♦ H. Andiwahab DT. Majokayo, SM, HK, ♦ Ny. Hj. Nurhayati Yasin Limpo ♦ Ir. Sutjipto, ♦ Drs. H. A. Chozin Chumaidy, ♦ Drs. H. Guntur Sasono, M.Si, ♦ Drs. H.A.M. Fatwa, ♦ H. Hermansyah Nazirun, SH ♦ Drs. H. Saifullah Ma'shum, M.Si, ♦ Prof. DR. Ryaas Rasyid, MA.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, BKN, LAN, dan ANRI, dibuka pukul 10.30 WIB dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Yth. E.E. Mangindaan, S.IP

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

A. Rekrutmen CPNS

1. Model pengorganisasian rekrutmen CPNS tahun 2007, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi dan pelaporan rencananya diarahkan sebagaimana pola rekrutmen CPNS tahun 2005.
2. Jumlah tambahan formasi CPNS Tahun 2007 direncanakan sejumlah 275.000, dengan rincian tenaga honorer Pusat dan Daerah sejumlah 175.000 orang yang merupakan kelanjutan dari program pengangkatan tenaga honorer yang ada dalam database BKN termasuk didalamnya Guru PTT dan Guru Bantu yang memenuhi persyaratan dan dari pelamar umum untuk instansi pusat dan daerah sejumlah 100.000 orang.
3. Pelaksanaan rekrutmen CPNS formasi Tahun 2007 direncanakan sekitar bulan Mei dan Juni 2007. Sumber dana rekrutmen CPNS untuk pengadaan CPNS Tahun 2007 untuk Instansi Pusat menggunakan dana APBN tahun 2007 dan untuk Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menggunakan APBD Tahun 2007.

B. Perampingan PNS

1. Dalam rangka membangun PNS yang profesional sehingga pelayanan kepada publik dapat dilaksanakan secara optimal, perlunya dilakukan penataan pegawai, hal ini disebabkan karena belum kondusifnya jumlah dan distribusi PNS berdasarkan PUPNS tahun 2003, dengan cara merealokasi dan redistribusi pegawai dari satu unit kerja yang dirasakan terjadi kelebihan pegawai ke unit lain yang masih kekurangan pegawai, penataan tersebut dapat diperluas antar instansi, Kabupaten/Kota maupun antar Provinsi.
2. Latar belakang pemikiran perlunya dilakukan penataan PNS, antara lain karena terjadinya ketimpangan jumlah PNS yang melaksanakan tugas sebagai tenaga administrasi dengan PNS yang melaksanakan tugas yang bersifat fungsional sebagai pelaksana tugas pokok organisasi.

C. Pensiunan PNS

Pada tahun 2019, diperkirakan jumlah pensiunan PNS mencapai 5 Juta orang, sehingga negara harus menyediakan anggaran sebesar Rp. 6,1 Triliun/Bulan sehingga satu tahun akan mencapai Rp. 72 Triliun, dan beban tersebut akan terus naik dan bertambah, yang pada saat ini berjumlah 2.090.602 orang. Perlu dikaji untuk dicari solusi terbaik bagi para pensiunan maupun terhadap kemampuan keuangan negara dan hal-hal lainnya yang terkait.

D. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi difokuskan pada langkah dan upaya Penataan Kelembagaan; Penataan kepegawaian/SDM aparatur;Efisiensi ketatalaksanaan;Peningkatan akuntabilitas aparatur;Peningkatan kualitas pelayanan publik;Peningkatan sistem pengawasan;Optimalisasi koordinasi program pendayagunaan aparatur negara, dalam rangka peningkatan kinerja dan reformasi pelayanan publik.

E. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

Rencana kerja sistem informasi manajemen kepegawaian (cetak biru) dimaksudkan untuk mewujudkan integrasi sistem informasi kepegawaian terkini dan terintegrasi instansi pusat dan daerah.

III. PENUTUP/KESIMPULAN

Setelah Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, BKN, LAN, dan ANRI menyampaikan penjelasannya dan memberikan jawaban atas pertanyaan Anggota Komisi II DPR-RI, dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Komisi II DPR RI meminta kepada Saudara MENPAN segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil agar proses rekrutmen menjadi lebih mudah dan sederhana, paling lambat akhir bulan Februari 2007 sudah selesai .
2. Komisi II DPR RI meminta laporan tertulis kepada MENPAN tentang:
 - a. perkembangan dan kemajuan rekrutmen dari setiap kategori tenaga honorer (guru bantu, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, dan tenaga-tenaga khusus) meliputi metode pengecekan dan validasi data dilapangan yang menyangkut nama-nama yang sudah ada di data nasional dan daerah.
 - b. *Time schedule* yang jelas dan terukur dari proses rekrutmen sampai penetapan sebagai PNS dari jenis-jenis kategori tenaga honorer dimaksud.
3. Dalam rangka untuk memperoleh data yang jelas dan kepastian jumlah tenaga honorer yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga tahun 2009, Komisi II DPR RI meminta kepada Saudara MENPAN dan Ka. BKN berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memperbaiki sistem pendataan tenaga honorer, melakukan pengecekan ke daerah-daerah terhadap kebenaran pembayaran tenaga honorer yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
4. Komisi II DPR RI berpendapat perlu dibentuk Tim yang bersifat sementara yang keanggotaannya terdiri atas MENPAN, BKN, yang didampingi oleh Tim Kerja Aparatur Komisi II DPR RI untuk menindaklanjuti perbaikan sistem pendataan dan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS dan percepatan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, serta melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yang telah direvisi.
5. Dalam rangka persiapan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh PNS di daerah otonom yang baru saja terbentuk, Komisi II DPR-RI meminta kepada MENPAN untuk segera melakukan pembinaan intensif terhadap Aparatur di Daerah Otonom Baru.
6. Dalam rangka reformasi birokrasi, Komisi II DPR RI juga meminta kepada Saudara MENPAN dan jajarannya berupaya keras mengatasi dan mencari solusi untuk meningkatkan kinerja \pm 55% PNS yang berkualitas rendah dengan melakukan audit total terhadap birokrasi, termasuk menyusun *Grand Strategy* tentang kebutuhan riil PNS sesuai dengan kondisi yang berkembang di Indonesia untuk 5-10 tahun mendatang dan meminta MENPAN untuk melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Aparatur Negara.
7. Berkaitan dengan penganggaran terhadap kegiatan pendidikan dan latihan, seminar, penyuluhan dan lokakarya Komisi II DPR RI meminta kepada Saudara MENPAN untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait untuk meninjau kembali alokasi anggaran kegiatan-kegiatan tersebut.
8. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, pasti, transparan dan akuntabel, Komisi II DPR RI dan Saudara MENPAN sepakat untuk segera melanjutkan dan menyelesaikan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Pelayanan Publik, dan Komisi II DPR RI mendukung program MENPAN untuk melakukan survey nasional tentang Pelayanan Publik.
9. Komisi II DPR RI meminta kepada MENPAN berkoordinasi dengan instansi penegak hukum untuk menindaklanjuti secara hukum terhadap semua pihak yang terkait dengan proses terbitnya data Tenaga Honorer fiktif.

10. Untuk menjaga wibawa dan disiplin Aparatur Negara, maka Komisi II DPR RI meminta kepada MENPAN untuk mengambil tindakan penegakan disiplin terhadap pejabat-pejabat yang bermasalah/terlibat masalah hukum termasuk tidak diangkat dalam jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat diakhiri pukul 15.50 WIB.

Jakarta, 15 Januari 2007
PIMPINAN KOMISI II DPR RI
KETUA,

E.E. MANGINDAAN, S.IP
A-128